



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kabupaten Purwakarta**

POLICY BRIEF

Inovasi Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Angka Kemiskinan



Bidang Penelitian Pengembangan dan Pelaporan

Disusun Oleh :

**Endra Prasetyo, ST.MT.
Analisis Kebijakan Ahli Muda**

2023



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Gandanegara No. 25 Telepon/Fax. (0264) 8307463
Website : www.bappelitbangda.purwakarta.go.id e-mail : bappedakabpurwakarta@gmail.com
Purwakarta - 41111

SURAT PERINTAH

Nomor : KPG.11.01/199/Litb-Bappelitbangda/2023

Dasar : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : Endra Prasetyo, ST., MT.
NIP : 19750130 200604 1 006
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/ IV.a
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Unit Kerja : Bappelitbangda Kab. Purwakarta

Untuk : Menyusun *Policy Paper* (Makalah Kebijakan)/ *Policy Brief* (Ringkasan Kebijakan) dengan tema Inovasi Daerah untuk mendukung Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Purwakarta.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 10 Juli 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Hj. NINA HERLINA, S.Sos
Pembina Tk. I/IV b

Lembar Persetujuan
POLICY BRIEF
Inovasi Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan
Pengurangan Angka Kemiskinan

Purwakarta, Juli 2023

Penyusun :
Analisis Kebijakan Ahli Muda



Endra Prasetyo, ST.MT
Pembina / IV.a
NIP. 19750130 200604 1 006

Menyetujui :
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan
dan Pelaporan



Dyah Imas Tisnaniadewy, AKS. MM.
NIP. 19710215 199303 2 009
Pembina / IV.a

Mengetahui
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Purwakarta




Nina Herlina, S. Sos
NIP. 19690101 199501 2 003
Pembina Tk. I/ IV.b

POLICY BRIEF

Inovasi Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Angka Kemiskinan

Resume :

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pola hubungan dimensi 1 antara pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan di Indonesia tidak terlihat jelas secara grafis. Artinya, secara umum selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tidak memiliki efek langsung terhadap angka kemiskinan di Indonesia, yang berarti opsi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi tidaklah tepat, karena berdasarkan sebaran data visual opsi penyelesaian kedua hal tersebut secara individual dapat berasal dari opsi-opsi yang berbeda, atau dari opsi yang sama. Pendekatan teoritis menunjukkan bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi maupun pengurangan angka kemiskinan dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan Permodalan Value Creation Inovasi Teknologi Tepat Guna.

Saran Kebijakan :

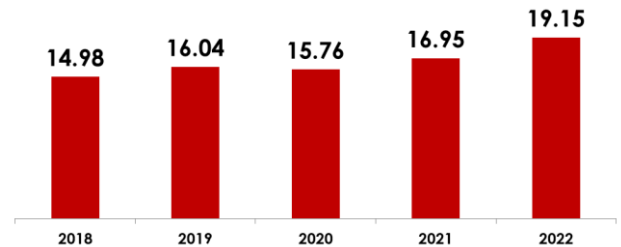
Dengan hipotesis bahwa sektor UMKM merupakan sektor terdekat yang memiliki peran maksimum dalam pengentasan kemiskinan, salah satu kebijakan pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan adalah dengan mendorong penciptaan/desain inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan value/kuantitas barang dan/jasa (Value Creation) UMKM yang telah ada sebelumnya, melalui kebijakan Permodalan Value Creation Inovasi Teknologi Tepat Guna dengan/tanpa kerjasama dengan pihak perbankan.

Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan Nasional

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki tren yang cukup baik, walaupun sempat mengalami penurunan pada masa puncak pandemi COVID-19 tahun 2019-2020. Dengan nilai produk domestik bruto pada saat ini, setidaknya pendapatan per kapita penduduk Indonesia berada pada angka sekitar $\pm$ Rp. 68.88 juta per kapita per tahun pada akhir tahun 2022, namun angka kemiskinan justru mengalami tren yang jelas selama sebelum, semasa dan setelah puncak pandemi COVID-19 tahun 2019-2020-2022, yaitu terus mengalami peningkatan, sebelum akhirnya kembali turun di angka 26.26 juta jiwa di tahun 2022. Secara visual dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 yang lalu memiliki efek / dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan jumlah penduduk miskin secara nasional, dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 5.09% per tahun di tahun 2020 dan sebesar 4.24% per tahun di tahun 2021.

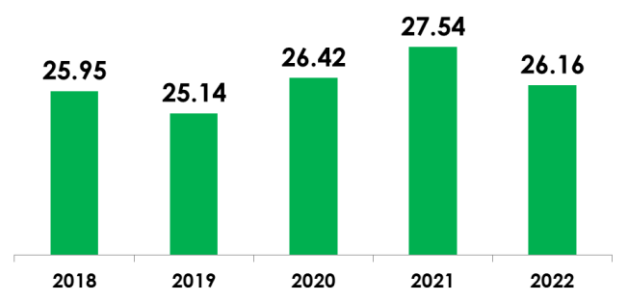
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Nasional
(Rp. Kuadriliun)

Sumber Data : www.bps.go.id



Jumlah Penduduk Miskin Nasional (Juta Jiwa)

Sumber Data : www.indonesiabaik.com

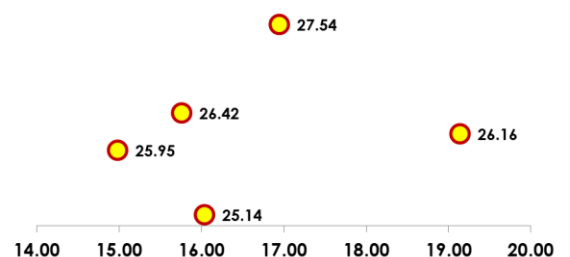


Kondisi perekonomian makro di Indonesia selama 5 tahun terakhir (tahun 2018-2022) menunjukkan bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mengalami penurunan sebesar Rp. 0.28 kuadriliun, atau sebesar 1.75% per tahun pada masa puncak pandemi COVID-19 di kurun waktu tahun 2019-2020. Pertumbuhan berikutnya sebesar 7.55% per tahun. Di sisi lain, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2019-2020 dan kembali menurun pada akhir tahun 2022. Dengan hasil plotting yang menunjukkan pola hubungan 1 dimensi yang kurang jelas antara pertumbuhan PDRB dengan angka kemiskinan, pendekatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan seharusnya dilakukan secara terpisah, meskipun menggunakan asal muasal metode yang sama, dalam artian tidak bersandar pada pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif pasti berefek langsung pada pengurangan angka kemiskinan.

Tahun	PDRB ADHB (Rp. Kuadriliun)	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
2018	14.98	9.82%	25.95
2019	16.04	9.41%	25.14
2020	15.76	9.78%	26.42
2021	16.95	10.14%	27.54
2022	19.15	9.54%	26.16

Sumber Data www.bps.go.id www.indonesiabaik.com www.indonesiabaik.com

Plotting Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
(Rp. Kuadriliun) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Tahun 2018-2022



Inovasi dan Produktivitas dalam Pertumbuhan Ekonomi

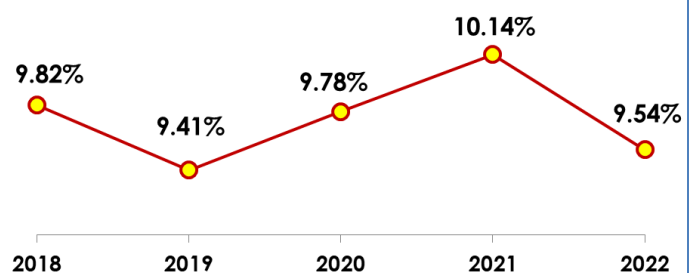
Dalam terminologi perekonomian, inovasi mencakup pengembangan dari ide dan pengaplikasian teknologi pada pelayanan publik, atau meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja-produksi. European Central Bank (ECB) berpendapat bahwa dengan menjadikan inovasi sebagai driver (pencetus) pertumbuhan ekonomi pada saat pihak perbankan telah menetapkan nilai suku bunga, inovasi memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dari sisi peningkatan produktivitas dalam tercapai stabilitas harga pasar dan kurva permintaan-penawaran yang seimbang. Proses termudah dalam melakukan inovasi dari sisi terminologi ini adalah dengan cara melakukan **Difusi inovasi**, yaitu mengembangkan inovasi yang sudah ada sebelumnya menjadi berskala besar hingga dapat memberikan benefit ekonomi melewati batas-batas skala ekonomi dan sektoral (**European Central Bank, 2017**). Maka, kesimpulan yang dapat ditarik dari sisi terminologi perekonomian adalah bahwa inovasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, menurut European Central Bank, adalah inovasi yang bersifat :

- 1) Terapan, dalam artian dapat diaplikasikan pada aktivitas ekonomi real (teknologi tepat guna). Ini adalah hal yang masuk akal dari sisi pandang pihak perbankan, karena bank umum sebagai pemberi pinjaman modal usaha dan bank sentral sebagai penentu suku bunga pinjaman selalu berpendapat lebih mudah menghitung profit dan risiko finansial pada produk-produk barang real (investasi sektor real).
- 2) Dapat/relatif mudah untuk dikembangkan secara lebih inovatif untuk mencapai level operasional yang lebih efektif dan efisien.
- 3) Bersifat difusif, dalam arti dapat dikembangkan dan disebarluaskan dalam skala besar melewati batas-batas skala ekonomi dan sektoral.

Inovasi dalam Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan

Di negara-negara miskin dan berkembang, kalangan masyarakat berpenghasilan rendah sulit untuk memperoleh pekerjaan karena level pendidikan yang kurang memadai dan juga sulit untuk memulai usaha/bisnis privat dalam upayanya memperbaiki taraf hidup. Di samping karena kelemahan modal sendiri, hal tersebut juga disebabkan karena tidak memiliki hal-hal sebagaimana disyaratkan pada saat memulai usaha/bisnis di sektor real dengan mengajukan pinjaman bank. Keberadaan usaha masyarakat kecil dan menengah (UMKM) pun tidak memiliki skala ekonomi yang cukup dalam menyerap tenaga kerja dari golongan masyarakat miskin. Dari sisi produksi (barang dan jasa), **Rosenberg (2004)** menyatakan bahwa cara berpikir secara ekonomis untuk meningkatkan value/kuantitas produk/jasa adalah dengan cara meningkatkan jumlah input, atau menggunakan cara baru untuk meningkatkan value/kuantitas produk/jasa menggunakan jumlah input yang sama seperti sebelumnya, yang bisa juga dilakukan sebagaimana menurut uraian **European Central Bank (2017)** adalah dengan cara/metode **Difusi Inovasi** yaitu mengembangkan inovasi yang sudah ada sebelumnya menjadi berskala besar sehingga dapat memberikan benefit ekonomi melewati batas-batas skala ekonomi dan sektoral. Saran tak-langsung dari European Central Bank yang menyatakan bahwa inovasi teknologi tepat guna merupakan upaya ekonomi yang dipandang mudah dalam hal kalkulasi risiko investasi sektor real oleh pihak perbankan. Dengan

Persentase Penduduk Miskin Nasional
Sumber Data : www.indonesiabaik.com



demikian, pemerintah memiliki 2(dua) opsi sekaligus 2(dua) konsekuensi yang perlu dipilih dalam mengatasi kemiskinan berbasis inovasi, yaitu :

- 1) Menyediakan porsi anggaran dalam koridor bantuan permodalan bagi golongan masyarakat miskin untuk memulai usaha menggunakan inovasi teknologi tepat guna, mengikuti opini dari European Central Bank tersebut di atas. Lingkup terbaik dalam upaya ini adalah bekerja sama dengan pihak perbankan, dimana golongan masyarakat miskin dapat mengakses pinjaman modal usaha dari bank-bank yang telah menerima penyertaan modal dari pemerintah. Metode ini memiliki kelemahan yang secara struktural berasal dari kondisi kemiskinan itu sendiri yaitu adanya prosedur penyertaan proposal dan segenap persyaratan administratif dari pihak perbankan umumnya yang relatif rumit bagi golongan masyarakat miskin. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena akses pinjaman tersebut diberikan untuk memulai usaha dari nol.
- 2) Menyediakan porsi anggaran dalam koridor bantuan permodalan bagi para pengusaha kecil / UMKM untuk penciptaan/desain inovasi atau pengembangan inovasi (difusi inovasi) teknologi tepat guna untuk meningkatkan value/kuantitas produk/jasa. Yang harus diperhatikan dalam opsi ini adalah bahwa koridor bantuan pemodalannya ini dapat bersifat langsung dari pemerintah ataupun melalui pihak perbankan, dan yang perlu dicatat adalah bahwa penemuan atau difusi inovasi teknologi tepat guna tersebut tidak berdampak signifikan pada sisi tenaga kerja, artinya tidak terjadi pengurangan tenaga kerja sebagai akibat dari timbulnya efisiensi produksi. Artinya, penciptaan/desain inovasi teknologi tepat guna tersebut hingga di titik tertentu lebih berfokus pada pengembangan inovasi yang sudah ada sebelumnya menjadi berskala besar sehingga dapat meningkatkan value/kuantitas barang dan/jasa dengan input yang relatif sama seperti sebelumnya, atau disebut dengan Value Creation.

Kesimpulan

Secara umum pertumbuhan ekonomi tidak memiliki efek langsung terhadap angka kemiskinan di Indonesia, paling tidak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan hipotesis bahwa sektor UMKM merupakan sektor terdekat yang memiliki peran maksimum dalam pengentasan kemiskinan, salah satu kebijakan pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan adalah dengan mendorong penciptaan/desain inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan value/kuantitas barang dan/jasa (Value Creation) UMKM, melalui kebijakan Permodalan Value Creation Inovasi Teknologi Tepat Guna dengan/tanpa kerjasama dengan pihak perbankan.

Referensi

- Anonim, 2017, How Does Innovation Lead to Growth ?, www.ecb.europa.eu, date of access : July 11, 2023, Copyright : 2023, European Central Bank.
- Rosenberg, N., 2004, Innovation and Economic Growth, Stanford University – Organization For Economic Co-operation and Development (OECD), USA.